

**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMSTER II TA 2021**

BALAI VETERINER SUBANG

**Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2021**



Jl. Terusan Garuda Blok Werasari
RT 33 RW 11 Kelurahan Dangdeur
Subang 41212
Telp. (0260) 7423134 Fax 7423178

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Veteriner Subang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Veteriner Subang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Veteriner Subang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Subang, Januari 2022
Kepala Balai,

drh. S. DIRUN, MP.
NIP. 197009081999031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

E.2. Surplus/Defisit-LO

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

- E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
- E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
- E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
- E.3.4. Koreksi Lain-lain
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Veteriner Subang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Subang, Januari 2022
Kepala Balai,

drh. SODIRUN, MP.
NIP. 197009081999031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Veteriner Subang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.239.101.243,00 atau mencapai 151,11% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp820.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp31.259.887.843,00 atau mencapai 97,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp32.027.779.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp53.739.894.525,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.007.618.742,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp51.732.275.783,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp83.643.608,00 dan Rp53.656.250.917,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.163.705.398,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp31.165.470.821,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-30.001.765.423,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp97.992.610,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-29.903.772.813,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp53.356.899.180,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-29.903.772.813,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp700,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp30.203.123.850,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp53.656.250.917,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI VETERINER SUBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER
2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	820.000.000,00	1.239.101.243,00	151,11	825.918.173,00
Jumlah Pendapatan		820.000.000,00	1.239.101.243,00	151,11	825.918.173,00
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3.542.365.000,00	3.505.971.532,00	98,97	3.215.565.037,00
Belanja Barang	B.4.	26.642.534.000,00	25.913.230.061,00	97,26	21.072.091.259,00
Belanja Modal	B.5.	1.842.880.000,00	1.840.686.250,00	99,88	2.093.571.500,00
Jumlah Belanja		32.027.779.000,00	31.259.887.843,00	97,60	26.381.227.796,00

II. NERACA

**BALAI VETERINER SUBANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.	1.674.000.000,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2.	22.596.765,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3.	-112.983,00	0,00
Persediaan	C.1.4.	311.134.960,00	131.728.795,00
Jumlah Aset Lancar		2.007.618.742,00	131.728.795,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	27.656.750.000,00	27.656.750.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	41.760.892.462,00	40.214.181.212,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	14.439.915.000,00	14.439.915.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4.791.248.169,00	4.791.248.169,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	137.564.800,00	137.564.800,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-37.054.094.648,00	-33.943.784.892,00
Jumlah Aset Tetap		51.732.275.783,00	53.295.874.289,00
Jumlah Aset		53.739.894.525,00	53.427.603.084,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	83.643.608,00	70.703.904,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		83.643.608,00	70.703.904,00
Jumlah Kewajiban		83.643.608,00	70.703.904,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	53.656.250.917,00	53.356.899.180,00
Jumlah Ekuitas		53.656.250.917,00	53.356.899.180,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		53.739.894.525,00	53.427.603.084,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI VETERINER SUBANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER
2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1.163.705.398,00	804.540.648,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.163.705.398,00	804.540.648,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.516.295.532,00	3.220.150.037,00
Beban Persediaan	D.3.	2.586.794.324,00	1.981.788.638,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.434.914.845,00	3.356.506.793,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	2.022.237.460,00	2.096.117.769,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.889.490.041,00	2.860.125.807,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	12.311.340.880,00	10.827.850.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	3.404.284.756,00	3.387.802.940,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	112.983,00	-106.888,00
JUMLAH BEBAN		31.165.470.821,00	27.730.235.096,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-30.001.765.423,00	-26.925.694.448,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	82.000.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	15.992.610,00	159.950,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	0,00	48.660,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		97.992.610,00	111.290,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-29.903.772.813,00	-26.925.583.158,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI VETERINER SUBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER
2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	53.356.899.180,00	51.327.537.637,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-29.903.772.813,00	-26.925.583.158,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	700,00	3.399.635.078,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0,00	-19.409.671,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	3.017.366.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0,00	401.678.749,00
Koreksi Lain-lain	E.3.4.	700,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	30.203.123.850,00	25.555.309.623,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	299.351.737,00	2.029.361.543,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	53.656.250.917,00	53.356.899.180,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Veteriner Subang

Balai Veteriner Subang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Veteriner Subang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Veteriner Subang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Veteriner Subang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Veteriner Subang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Veteriner Subang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Veteriner Subang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.200.000,00	1.200.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	818.000.000,00	818.000.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	800.000,00	800.000,00
Jumlah Pendapatan	820.000.000,00	820.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.363.365.000,00	3.494.365.000,00
Belanja Lembur	50.000.000,00	48.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.967.640.000,00	2.035.090.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.099.338.000,00	1.799.567.000,00
Belanja Barang Persediaan	3.681.808.000,00	3.420.911.000,00
Belanja Jasa	926.720.000,00	787.143.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.310.040.000,00	1.261.469.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.224.750.000,00	2.994.354.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	15.500.000.000,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	14.344.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.828.500.000,00	1.842.880.000,00
Jumlah Belanja	35.952.161.000,00	32.027.779.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.239.101.243,00 atau mencapai 151,11% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp820.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	818.000.000,00	1.063.576.500,00	130,02
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.200.000,00	125.885.148,00	10.490,43
Pendapatan Denda	0,00	16.646.985,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	15.992.610,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	800.000,00	17.000.000,00	2.125,00
Jumlah	820.000.000,00	1.239.101.243,00	151,11

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 50,03% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Veteriner Subang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.063.576.500,00	796.868.000,00	33,47
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	125.885.148,00	7.412.648,00	1.598,25
Pendapatan Denda	16.646.985,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	60.000,00	-100,00
Pendapatan Lain-Lain	15.992.610,00	21.377.525,00	-25,19
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	17.000.000,00	200.000,00	8.400,00
Jumlah	1.239.101.243,00	825.918.173,00	50,03

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp31.259.887.843,00 atau 97,60% dari anggaran belanja sebesar Rp32.027.779.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.542.365.000,00	3.508.501.786,00	99,04
Belanja Barang	26.642.534.000,00	25.913.230.061,00	97,26
Belanja Modal	1.842.880.000,00	1.840.686.250,00	99,88
Total Belanja Kotor	32.027.779.000,00	31.262.418.097,00	97,61
Pengembalian Belanja		-2.530.254,00	0,00
Total Belanja	32.027.779.000,00	31.259.887.843,00	97,60

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 18,49% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan karena adanya penambahan jumlah pegawai dan jiwa, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
2. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan karena adanya kegiatan pemulihan ekonomi nasional berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.
3. Realisasi belanja modal mengalami penurunan karena alokasi anggaran belanja modal mengalami penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	3.505.971.532,00	3.215.565.037,00	9,03
Belanja Barang	25.913.230.061,00	21.072.091.259,00	22,97
Belanja Modal	1.840.686.250,00	2.093.571.500,00	-12,08
Total Belanja	31.259.887.843,00	26.381.227.796,00	18,49

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.505.971.532,00 dan Rp3.215.565.037,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,03% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan jumlah pegawai negeri sipil
2. Kenaikan pangkat, jabatan dan gaji berkala
3. Penambahan jumlah jiwa

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.472.190.786,00	3.177.736.211,00	9,27
Belanja Lembur	36.311.000,00	39.294.000,00	-7,59
Jumlah Belanja Kotor	3.508.501.786,00	3.217.030.211,00	9,06
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.530.254,00	-1.465.174,00	72,69
Jumlah Belanja	3.505.971.532,00	3.215.565.037,00	9,03

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp25.913.230.061,00 dan Rp21.072.091.259,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 22,97% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh peningkatan anggaran belanja barang pada tahun 2021.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.023.242.190,00	2.153.370.731,00	-6,04
Belanja Barang Non Operasional	1.642.245.024,00	524.596.380,00	213,05
Belanja Barang Persediaan	3.401.678.523,00	2.892.894.933,00	17,59
Belanja Jasa	766.811.227,00	675.862.929,00	13,46
Belanja Pemeliharaan	1.204.422.176,00	1.137.390.479,00	5,89

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.889.490.041,00	2.860.125.807,00	1,03
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	10.827.850.000,00	-100,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	13.985.340.880,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	25.913.230.061,00	21.072.091.259,00	22,97
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	25.913.230.061,00	21.072.091.259,00	22,97

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.840.686.250,00 dan Rp2.093.571.500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -12,08% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh [penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2021 meskipun secara kuantitas dan jenisnya lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.](#)

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.840.686.250,00	2.093.571.500,00	-12,08
Jumlah Belanja Kotor	1.840.686.250,00	2.093.571.500,00	-12,08
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.840.686.250,00	2.093.571.500,00	-12,08

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.840.686.250,00 dan Rp2.093.571.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -12,08% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh [penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2021 meskipun secara kuantitas dan jenisnya lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.](#)

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.840.686.250,00	2.093.571.500,00	-12,08
Jumlah Belanja Kotor	1.840.686.250,00	2.093.571.500,00	-12,08
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.840.686.250,00	2.093.571.500,00	-12,08

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.674.000.000,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021
Pengadaan sapi indukan lokal (200 ekor) @13.950.000/ekor yang kontraknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (teralisasi 80 ekor) diberikan pemberian kesempatan sampai dengan tanggal 31 Januari 2022	1.674.000.000
Jumlah	1.674.000.000

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp22.596.765,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2021

No	Nama Debitur	31 Desember 2021
1.	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan sapi Prop. Jawa Barat wilayah Timur termin 3	13.040.468,00
2.	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan sapi Prop. Jawa Barat wilayah timur termin 4	9.556.297,00
	Jumlah	22.596.765,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-112.983,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	22.596.765,00	0.5%	112.983,00

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Jumlah	22.596.765,00		112.983,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp311.134.960,00 dan Rp131.728.795,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	59.467.454,00	60.276.095,00
Bahan untuk Pemeliharaan	2.147.466,00	4.300.000,00
Suku Cadang	83.518.490,00	30.124.500,00
Bahan Baku	166.001.550,00	37.028.200,00
Jumlah	311.134.960,00	131.728.795,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Veteriner Subang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp27.656.750.000,00 dan Rp27.656.750.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Veteriner Subang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp41.760.892.462,00 dan Rp40.214.181.212,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	40.214.181.212,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.840.686.250,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-293.975.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	41.760.892.462,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-34.090.816.917,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	7.670.075.545,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa :

1. Mutasi penambahan karena adanya pembelian peralatan dan mesin berupa alat laboratorium dan pendukung lainnya
2. Mutasi pengurangan salah satunya disebabkan karena adanya lelang kendaraan roda 4 yang rusak.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Veteriner Subang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.439.915.000,00 dan Rp14.439.915.000,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Veteriner Subang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.791.248.169,00 dan Rp4.791.248.169,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Veteriner Subang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp137.564.800,00 dan Rp137.564.800,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Veteriner Subang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-37.054.094.648,00 dan Rp-33.943.784.892,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	41.760.892.462,00	-34.090.816.917,00	7.670.075.545,00
2.	Gedung dan Bangunan	14.439.915.000,00	-1.292.170.467,00	13.147.744.533,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.791.248.169,00	-1.671.107.264,00	3.120.140.905,00
4.	Aset Tetap Lainnya	137.564.800,00	0,00	137.564.800,00
Akumulasi Penyusutan		61.129.620.431,00	-37.054.094.648,00	24.075.525.783,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp83.643.608,00 dan Rp70.703.904,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Veteriner Subang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	29.783.000,00	19.459.000,00

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	53.860.608,00	51.244.904,00
Jumlah	83.643.608,00	70.703.904,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp53.656.250.917,00 dan Rp53.356.899.180,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.163.705.398,00 dan Rp804.540.648,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	39.243.750,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0,00	60.000,00	-100,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	17.000.000,00	200.000,00	8.400,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	38.750.000,00	2.277.500,00	1.601,43
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.063.576.500,00	796.868.000,00	33,47
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.135.148,00	5.135.148,00	0,00
Jumlah	1.163.705.398,00	804.540.648,00	44,64

Secara umum kenaikan PNBPN disebabkan oleh meredanya pandemi covid-19, untuk pendapatan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah terdiri dari tahun 2021 senilai Rp16.646.985 dan tahun lalu Rp22.596765.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.516.295.532,00 dan Rp3.220.150.037,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.304.477.480,00	2.176.279.960,00	5,89
Beban Pembulatan Gaji PNS	37.946,00	36.460,00	4,08
Beban Tunj. Anak PNS	59.748.724,00	56.341.572,00	6,05
Beban Tunj. Beras PNS	157.803.180,00	129.559.380,00	21,80
Beban Tunj. Fungsional PNS	391.710.000,00	260.310.000,00	50,48
Beban Tunj. PPh PNS	6.282.746,00	2.513.467,00	149,96
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	40.320.000,00	-37,50
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	177.476.456,00	174.330.348,00	1,80
Beban Tunjangan Umum PNS	29.320.000,00	36.974.850,00	-20,70
Beban Uang Lembur	36.311.000,00	39.294.000,00	-7,59
Beban Uang Makan PNS	327.928.000,00	304.190.000,00	7,80

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Jumlah	3.516.295.532,00	3.220.150.037,00	9,20

Secara umum kenaikan belanja pegawai disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan jabatan fungsional. Khusus untuk tunjangan jabatan struktural dan fungsional umum mengalami penurunan karena adanya penyetaraan jabatan dan pengangkatan fungsional umum menjadi fungsional khusus.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.586.794.324,00 dan Rp1.981.788.638,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	2.217.545.450,00	1.579.940.683,00	40,36
Beban Persediaan konsumsi	147.352.104,00	224.303.655,00	-34,31
Beban persediaan lainnya	221.896.770,00	177.544.300,00	24,98
Jumlah	2.586.794.324,00	1.981.788.638,00	30,53

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.434.914.845,00 dan Rp3.356.506.793,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	203.121.647,00	239.922.568,00	-15,34
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	562.357.660,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	849.665.717,00	258.433.812,00	228,78
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	73.488.100,00	-100,00
Beban Barang Operasional Lainnya	149.654.000,00	351.821.037,00	-57,46
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	235.332.000,00	203.940.000,00	15,39
Beban Honor Output Kegiatan	27.100.000,00	26.240.000,00	3,28
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	43.300.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultan	94.208.400,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	4.400.000,00	56.900.000,00	-92,27

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.273.157.815,00	1.253.646.299,00	1,56
Beban Langganan Air	4.356.000,00	4.337.000,00	0,44
Beban Langganan Listrik	563.725.498,00	558.425.046,00	0,95
Beban Langganan Telepon	59.437.733,00	50.940.636,00	16,68
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	343.234.175,00	248.461.695,00	38,14
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21.864.200,00	22.013.600,00	-0,68
Beban Sewa	0,00	7.937.000,00	-100,00
Jumlah	4.434.914.845,00	3.356.506.793,00	32,13

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.022.237.460,00 dan Rp2.096.117.769,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224.166.025,00	186.389.610,00	20,27
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	51.450.625,00	37.584.700,00	36,89
Beban Pemeliharaan Jaringan	16.073.225,00	15.676.567,00	2,53
Beban Pemeliharaan Lainnya	0,00	14.950.000,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	912.732.301,00	882.789.602,00	3,39
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9.062.294,00	3.502.400,00	158,75
Beban Persediaan suku cadang	808.752.990,00	955.224.890,00	-15,33
Jumlah	2.022.237.460,00	2.096.117.769,00	-3,52

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.889.490.041,00 dan Rp2.860.125.807,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.681.907.248,00	2.278.856.578,00	-26,20
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.133.462.205,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.303.000,00	37.980.500,00	-70,24
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	62.817.588,00	543.288.729,00	-88,44

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Jumlah	2.889.490.041,00	2.860.125.807,00	1,03

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.311.340.880,00 dan Rp10.827.850.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12.311.340.880,00	10.827.850.000,00	13,70
Jumlah	12.311.340.880,00	10.827.850.000,00	13,70

Kenaikan Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat karena adanya kenaikan anggaran dan kegiatan tersebut.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.404.284.756,00 dan Rp3.387.802.940,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	321.020.972,00	321.015.352,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	78.895.468,00	78.895.468,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	103.591.411,00	103.591.411,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	109.491.369,00	109.491.369,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.791.285.536,00	2.774.809.340,00	0,59
Jumlah	3.404.284.756,00	3.387.802.940,00	0,49

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp112.983,00 dan Rp-106.888,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	112.983,00	-106.888,00	-205,70
Jumlah	112.983,00	-106.888,00	-205,70

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-48.660,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	159.950,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	82.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15.992.610,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	97.992.610,00	111.290,00	87.951,59

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp53.356.899.180,00 dan Rp51.327.537.637,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-29.903.772.813,00 dan Rp-26.925.583.158,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp700,00 dan Rp3.399.635.078,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-19.409.671,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.017.366.000,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp401.678.749,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp700,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	700,00
Jumlah	700,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.203.123.850,00 dan Rp25.555.309.623,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	31.259.887.843,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.239.101.243,00
Transfer Masuk	182.337.250,00
Jumlah	30.203.123.850,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.239.101.243,00 sedangkan DKEL sebesar Rp31.259.887.843,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp182.337.250,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Suku Cadang	024050199465858000KP	182.337.250,00
Jumlah			182.337.250,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp299.351.737,00 dan Rp2.029.361.543,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

-